



ASEAN PARLIAMENTARIANS FOR HUMAN RIGHTS

Anggota Parlemen di ASEAN Khawatir dengan Putusan Pengadilan Gubernur Jakarta

JAKARTA, 9 Mei 2017 – Anggota parlemen dari seluruh Asia Tenggara mengungkapkan keprihatinannya atas hukuman hari ini dari gubernur Kristen di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai Ahok, dua tahun penjara karena penistaan agama

"Putusan tersebut sangat membingungkan tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia dianggap sebagai pemimpin regional dalam hal demokrasi dan keterbukaan. Keputusan ini menempatkan posisi tersebut dalam bahaya dan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan Indonesia sebagai masyarakat yang terbuka, toleran, dan beragam," kata Charles Santiago, anggota Parlemen Malaysia dan Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR)

"Ahok telah menjadi korban meningkatnya ekstremisme dan politik yang menggunakan identitas agama. Putusan (pengadilan) ini memiliki dampak di luar asas keadilan bagi satu individu. Ini adalah kemenangan untuk intoleransi dan pertanda buruk hak-hak minoritas. Pada saat kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, berada di bawah ancaman yang semakin meningkat di seluruh wilayah, putusan ini menggemakan sinyal yang salah kepada tetangga Indonesia di masyarakat ASEAN," tambahnya. .

Ahok, gubernur Kristen di Jakarta setelah lima dasawarsa, dan pemimpin pertama dengan etnis Tionghoa, divonis melakukan penistaan agama oleh pengadilan negeri di Indonesia dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada hari Selasa, walaupun jaksa penuntut dalam kasus tersebut telah menuntut dengan masa hukuman yang lebih rendah dan tidak dipenjara. Ahok telah menyampaikan keinginannya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Dakwaan tersebut berasal dari pidato kampanye bulan September 2016, dimana ia mengutip sebuah ayat dari Al Qur'an untuk mengkritik argumen orang-orang yang mengatakan bahwa umat Islam tidak dapat memilih seorang pemimpin Kristen. Pembahasan tuduhan dan persidangan tersebut mendominasi liputan kampanyenya dalam Pemilihan Gubernur Jakarta, dimana ia kalah dari saingan Anies Baswedan pada 19 April..

APHR mengatakan bahwa putusan tersebut dapat mendorong kelompok garis keras berbasis agama di Indonesia dan mempertanyakan lebih lanjut mengenai hukum penistaan agama yang keras di Indonesia, dimana memungkinkan hukuman penjara sampai lima tahun bagi mereka yang terbukti bersalah..

"Kasus ini menunjukkan perlunya Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengatasi meningkatnya intoleransi agama dan merevisi undang-undangnya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia internasional, termasuk kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama," kata Santiago.

"Tuduhan menistakan agama ini sering digunakan oleh kelompok konservatif mayoritas untuk membungkam lawan politik dan kelompok minoritas, dan ini menyebabkan demokrasi Indonesia bergerak mundur," kata Wakil Ketua APHR Eva Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

ASEAN harus menemukan cara untuk memastikan bahwa demokrasi tidak akan terkikis oleh intoleransi agama dan kelompok yang memanfaatkan perpecahan agama untuk melanjutkan agenda politik. Ini sudah terjadi di negara-negara seperti Myanmar, dan sekarang kita melihat hal yang sama di Indonesia, yang merupakan barometer demokrasi regional. "